

Laporan Keuangan
Audited TA 2023
Periode yang Berakhir
31 Desember 2023



Jalan Letjen Sutoyo No. 19

Pontianak

78121

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 30 April 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Constantinus Chrisnan Soegihprajoko



Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	24
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya	29

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK

JALAN LETJEN SUTOYO NOMOR 19, PONTIANAK
TELEPON (0561) 735269, FAKSIMILI(0561) 741891

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPKNL Pontianak yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 30 April 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Contantinus Chrisnan Soegiherprajoko

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPKNL Pontianak Periode *Audited* Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.253.712.544 atau mencapai 118,19 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp6.983.536.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.105.757.131 atau mencapai 89,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.349.406.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.730.282.547 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp164.359.068, Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.565.923.479, dan aset lainnya Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp172.917.519 dan Rp14.557.365.028.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.154.919.805, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.204.886.235, ditambah Pendapatan dari kegiatan non Operasional sebesar Rp10.170.000 dan beban non Operasional sebesar Rp19.717.633, sehingga total Surplus/Defisit Laporan Operasional senilai Rp5.940.485.937.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp14,507.836.554 ditambah Surplus-LO sebesar Rp5.940.485.937, transaksi antar entitas senilai (Rp5.902.937.463), Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp11.980.000, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 14.557.365.028.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.983.536.000	8.253.712.544	118,19	5.968.977.979
JUMLAH PENDAPATAN		6.983.536.000	8.253.712.544	118,19	5.968.977.979
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.127.438.000	1.913.157.131	89,93	1.632.046.879
Jumlah Belanja Operasional		2.127.438.000	1.913.157.131	89,93	1.632.046.879
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	27.745.000	25.000.000	90,11	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6	194.223.000	167.600.000	86,29	-
Jumlah Belanja Modal		221.968.000	192.600.000	86,77	-
JUMLAH BELANJA		2.349.406.000	2.105.757.131	89,63	1.632.046.879

II. NERACA

KPKNL PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	65.456.535
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	162.016.143	2.439.925.193
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	-	23.166.204
Persediaan	C.5	2.342.925	2.691.360
Jumlah Aset Lancar		164.359.068	2.531.239.292
ASET TETAP			
Tanah	C.6	10.988.779.235	10.988.779.235
Peralatan dan Mesin	C.7	3.329.155.831	3.471.489.627
Gedung dan Bangunan	C.8	3.889.085.458	3.721.485.458
Aset Tetap Lainnya	C.9	12.884.267	12.884.267
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(3.653.981.312)	(3.766.538.611)
Jumlah Aset Tetap		14.565.923.479	14.428.099.976
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	-	3.529.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	(3.529.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14.730.282.547	16.959.339.268
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	172.917.519	2.451.502.714
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		172.917.519	2.451.502.714
JUMLAH KEWAJIBAN		172.917.519	2.451.502.714
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	14.557.365.028	14.507.836.554
JUMLAH EKUITAS		14.557.365.028	14.507.836.554
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.730.282.547	16.959.339.268

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KPKNL PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8.154.919.805	5.848.169.718
JUMLAH PENDAPATAN		8.154.919.805	5.848.169.718
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	100.798.840	167.330.955
Beban Barang dan Jasa	D.4	921.426.122	871.780.107
Beban Pemeliharaan	D.5	367.803.770	368.125.036
Beban Perjalanan Dinas	D.6	522.800.689	298.861.666
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	292.056.814	235.192.783
JUMLAH BEBAN		2.204.886.235	1.941.290.547
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.950.033.570	3.906.879.171
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		10.170.000	209.431.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		19.717.633	1.622.983
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	(9.547.633)	207.808.017
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(9.547.633)	207.808.017
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.940.485.937	4.114.687.188
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.9	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		5.940.485.937	4.114.687.188

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	14.507.836.554	14.595.706.538
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.940.485.937	4.114.687.188
KOREKSI NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	11.980.000	4.806.428
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(5.902.937.463)	(4.207.363.600)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		49.528.474	(87.869.984)
EKUITAS AKHIR	E.5	14.557.365.028	14.507.836.554

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realitis per tahun sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Pontianak, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Adapun rencana strategis tersebut adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib administrasi urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Mewujudkan tertib administrasi urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;

3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan;
4. Melaksanakan Inventarisasi dan penilaian BMN sesuai target secara berkesinambungan;
5. *Collecting* data kekayaan negara;
6. Meningkatkan penyelesaian Piutang Negara;
7. Melakukan penataan sistem administrasi dalam pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Meningkatkan citra lelang yang mampu memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa lelang;
9. Menyempurnakan sistem administrasi dan informasi dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, serta penanganan masalah hukum;
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Pontianak. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya yang saat ini terdapat dalam Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (*Audited*) Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca di kalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

AsetLainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp8.253.712.544

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.253.712.544 atau 118,19% dari estimasi anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.983.536.000. Pendapatan di lingkup KPKNL Pontianak berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan dari Bea Lelang oleh KPKNL Pontianak, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Jasa Giro, Pendapatan Jasa Lainnya.

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.105.757.131

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja instansi pada Audited Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.105.757.131 atau 89,63% dari anggaran belanja sebesar Rp2.349.406.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	2.127.438.000	1.913.157.131	89,93
Belanja Modal	221.968.000	192.600.000	86,77
Total Belanja	2.349.406.000	2.105.757.131	89,63

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	1.913.157.131	1.632.046.879	17,22
Belanja Modal	192.600.000	0	-
Jumlah	2.105.757.131	1.632.046.879	29,03

*Belanja Pegawai
 Rp0*

B.3 Belanja Pegawai

Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai KPKNL Pontianak pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh terdapat peralihan pembayaran gaji dari satker ke Kantor Pusat DJKN mulai bulan Agustus 2021. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Belanja Barang
 Rp1.913.157.131*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Tahun 2023 sebesar Rp1.913.157.131 atau mengalami kenaikan sebesar 17,22% dibandingkan periode yang sama pada TA 2022, yaitu sebesar Rp1.632.046.879.

*Belanja Modal
 Peralatan dan
 Mesin
 Rp25.000.000*

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp25.000.000 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0. Belanja Modal Peralatan dan mesin untuk Tahun 2023 terdiri dari AC Split sebanyak 5 (lima) unit.

*Belanja Modal
 Gedung dan
 Bangunan
 Rp167.600.000*

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp167.600.000 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0. Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 digunakan untuk Renovasi Rumah Negara Gol. II Tipe B.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut merupakan saldo Uang Persediaan Tunai KPKNL Pontianak yang sudah disetor ke Kas Negara.

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp65.456.535. Saldo tersebut merupakan saldo yang bersumber dari penerimaan negara sudah disetorkan ke kas negara pada tahun berjalan.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp162.016.143

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp162.016.143 dan Rp2.439.925.193.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan/atau penerimaan yang belum diserahkan kepada pihak ketiga berupa saldo rekening di bank. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	2023	2022
Hasil Bersih Lelang	-	2.181.884.496
Uang Jaminan yang Belum Diambil	-	171.025.100
Dana dalam Proses Identifikasi dan Konfirmasi	162.016.143	87.015.597
Jumlah	162.016.143	2.439.925.193

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp23.166.204.

Belanja Dibayar di
Muka Rp0

C.5 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja dibayar di muka pada tahun 2023. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih

harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Persediaan
Rp2.342.925

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.342.925 dan Rp2.691.360.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Tanah
Rp10.988.779.235

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPKNL Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.988.779.235 dan Rp10.988.779.235 . Adapun rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap berupa Tanah

No	Jenis	KIB	Luas	Nilai
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010104001	943 m2	Rp8.625.140.000
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	2010101002	300m2	Rp1.698.988.000
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Gol	2010101004	305m2	Rp664.651.235
Jumlah				Rp10.988.779.235

Peralatan dan Mesin
Rp3.329.155.831

C.8 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.329.155.831 dan Rp3.471.489.627.

Gedung dan Bangunan
Rp3.889.085.458

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan di lingkup KPKNL Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.889.085.458 dan Rp3.721.485.458.

Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	KIB	Luas	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	727 m2	Rp 2.948.629.250
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	4010101001	6 m2	Rp 7.488.000
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	4010101001	46 m2	Rp 134.780.000
4	Bangunan Terbuka Lainnya	4010125999	9 m2	Rp 81.626.000
5	Rumah Negara Gol II Tipe B Permanen	4010134004	120 m2	Rp 436.859.000
6	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	4010202010	133 m2	Rp 99.936.208
7	Pagar Permanen	4040104001	120 m2	Rp 146.711.000
8	Taman Semi Permanen	4010134002	200 m2	Rp 33.056.000
Jumlah				Rp 3.889.085.458

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2023 adalah Rp0 dikarenakan pada TA 2022 terdapat mutasi mutasi kurang karena direklas menjadi Gedung dan bangunan.

Aset Tetap Lainnya Rp12.884.267

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 masih sama dengan per 2022 sebesar Rp12.884.267.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp3.653.981.312)

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp3.653.981.312) dan (Rp3.766.538.611).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3.329.155.831	Rp 3.028.195.089	Rp 300.960.742
2	Gedung dan Bangunan	Rp 3.889.085.458	Rp 625.786.223	Rp 3.263.299.235
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp 7.218.241.289	Rp 3.653.981.312	Rp 3.564.259.977

*Aset Lain-lain Rp0***C.13 Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari penghentian penggunaan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat atau tidak terpakai, nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 sedangkan nilai per 2022 adalah sebesar Rp3.529.000.

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisa
si Aset Lainnya Rp0*

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan (Rp3.529.000).

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp172.917.519*

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp172.917.519 dan Rp2.451.502.714. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.16 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang tersebut muncul karena tagihan sudah dicatat pada modul Komitmen namun belum diterbitkan SPM-nya yang berasal dari Tagihan KKP, Penerimaan Barang/Jasa, dan lain-lain.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Uang muka ini merupakan Uang Persediaan KPKNL Pontianak.

*Ekuitas
Rp14.557.365.028*

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.557.365.028 dan Rp14.507.836.554. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp8.154.919.805

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.154.919.805 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 sebesar Rp5.848.169.718 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Uraian	2023	2022	% Real Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8.154.919.805	5.848.169.718	71,71
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	8.154.919.805	5.848.169.718	71,71

Terdapat pengembalian pendapatan karena terjadi kesalahan yaitu kelebihan penyeteroran pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sama dengan TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh terdapat peralihan pembayaran gaji dari satker ke Kantor Pusat DJKN mulai bulan Agustus 2020 sehingga pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat anggaran pada beban pegawai.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp100.798.840.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp100.798.840, turun 39,76% dari TA 2022 sebesar Rp167.330.955. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp921.426.122.*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp921.426.122 dan Rp871.780.107. Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

*Beban
Pemeliharaan
Rp367.803.770*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp367.803.770 dan Rp368.125.036. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.569.020	186.890.581	-27,46%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.288.050	181.234.455	8,31%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	35.946.700	0	0,00%
Jumlah	367.803.770	368.125.036	-0,09%

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp522.800.689*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp522.800.689 dan Rp298.861.666. Terjadi kenaikan perjalanan dinas dikarenakan perjalanan dinas sudah dilaksanakan dengan survey langsung ke lapangan. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	464.224.689	275.401.666	68,56%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.576.000	23.460.000	149,68%
Jumlah	522.800.689	298.861.666	74,93%

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp292.056.814

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp292.056.814 dan Rp235.192.783. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191.625.262	136.759.511	40,12%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	100.431.552	98.080.372	2,40%
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	0,00%
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	0,00%
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	-	352.900	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	292.056.814	235.192.783	24,18%

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(9.547.633)

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp(9.547.633). Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.170.000	209.431.000	0,00%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-19.717.633	-1.622.983	100,00%
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	0	0	0,00%
Beban penyesuaian nilai persediaan	0	0	0,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-9.547.633	207.808.017	104,59%

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Saldo Pos Luar Biasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp14.507.836.554

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.507.836.554 dan Rp14.595.706.538. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

Surplus(defisit) LO
Rp5.940.485.937

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah surplus sebesar Rp5.940.485.937 dan Rp4.114.687.188. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai Tahun
Berjalan
Rp11.980.000

E.3 Koreksi Nilai Tahun Berjalan

Terdapat koreksi Aset Non Revaluasi pada periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.980.000 dan Rp4.806.428.

Transaksi Antar
Entitas
(Rp5.902.937.463)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp5.902.937.463) dan (Rp4.207.363.600).

Ekuitas Akhir
Rp14.557.365.028

E.5 Ekuitas Akhir

Transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.557.365.028 dan Rp14.507.836.554.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pada tahun 2023 Pejabat Pengelola Keuangan di lingkup KPKNL Pontianak adalah sebagai berikut:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	M. Arif Setyawantika	Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko
Pejabat Pembuat Komitmen	Sumarno	Sumarno
Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	M. Iqbal Firzada	M. Iqbal Firzada
Bendahara	Bagus Hadi Prawibowo	Ferawati Anggraeni